

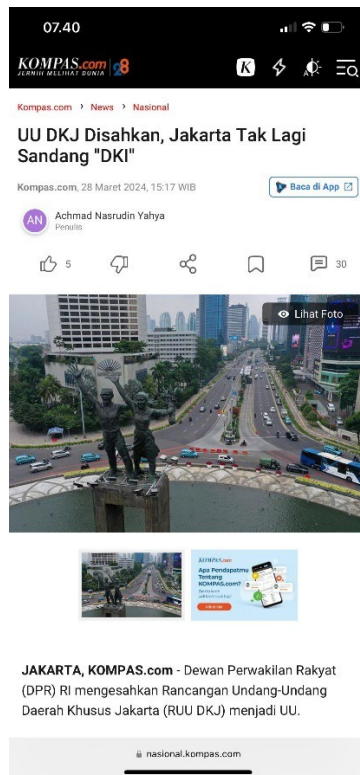
DAFTAR PUSTAKA

- Aliamsyah, M. (2009). "Pemanfaatan Sistem Informasi Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* VI/IV
- Ansori, Lutfil. (2019). *Legal Drafting : Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Suatu Penelitian : Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Chandra, & Helmi. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4).
- Dilla, S. (2011). *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dondokambey, Malena, S., & Andrea. (2023). Penerapan prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum*, XI(2).
- Erni, & Husnayati. (2004). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (U. I. Fakultas Hukum, Ed.) *Thesis*.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif*. Malang: YA3.
- Febriani, & Ayu, N. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi*, VII(2).
- Febriansyah, & Irawan, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, XXI(3).
- Haliim, Wimmy. (2016). "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, 1
- Hidayati, Siti. (2019). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, III (2)
- Ivanandin, & Alvionito, R. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemindahan Ibukota Negara. *SKRIPSI*.
- Isabela, Monica Ayu Caesar. "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik," *Kompas*, 15 Maret 2022, diakses 21 April 2024

- Jati, Rahendro. (2012). "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3)
- Karnay, S. (2020). Penerapan Electronic Government Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. *Disertasi Thesis*.
- Mahfud.MD, M. (2012). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group.
- Prastyo, Angga. (2020). "Pengaturan asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Cakrawala Hukum*, II
- Qoroni, Waisol dan Indien Winarwati. (2021). "Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Inicio Legis*, I
- Raisha Tuhumena, Callychya Juanitha, dkk. (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, III
- R.A.S Sastropoetro. (1998). *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan*. Bandung
- Risiyono, J. (2016). *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Riskiyono, D. (2022). *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*. Jakarta Selatan: Publika Indonesia Utama.
- S, H. (2005). *Komunikasi partisipatoris : Pemikiran dan implemantasi komunikasi dalam pengembangan masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Saifudin. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Safi, & Abdul, A. (2018). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata*. SKRIPSI.
- Satriani, Imani, & Mulyono, P. (2015). Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, II(1).
- Sedubun, Tuhumena, C. J., Pietersz, J. J., & Juzuf, V. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum*, I(2).

- Seta, Salahudin Tunjung. (2020). "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*
- Sirajuddin, dkk. (2006). *Legislative Drafting Pelebagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: YAPPIKA.
- Soetrisno, L. (2002). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutrisno, Lukman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Srampickal, & S.J, J. (2006). *Development and Participatory Communication. Communication Research Trends Centre for the Study of Communication and Culture, 25. No.2.*
- Yuliani, Andi. (2017). "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia, No.4*
- Yuliani. (2013). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yulianti, & Yoni. (2012). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Solok. Universitas Andalas.*

LAMPIRAN



Berita Pengesahan Rancangan Undang-Undang DKJ (Kompas.Com)



Wawancara dengan Ketua Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI
(Dr. Widodo, S.H, M.H)



Wawancara dengan Kasubag Rapat Badan Legislasi DPR RI
(Ibu Rosdiana, S.H, M.H)



Wawancara dengan Wakil Ketua Kaukus Muda Betawi selaku kelompok masyarakat yang berpartisipasi pada Undang-Undang DKJ
(Bapak Usni Hasanuddin)